

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kumpulan negara di dunia merumuskan *Sustainable Development Goals* atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sebagai program yang dicanangkan pertama kali oleh lembaga persatuan negara-negara di dunia yaitu Persatuan bangsa-bangsa yang lebih dikenal sebagai PBB atau *United Nation* sebagai bentuk tindak lanjut pembangunan dari program *millenium Development Goals* dimana tujuan pembangunan ini disusun dan dirancang oleh aktor pembangunan seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan, swasta, akademisi, dan sebagainya yang kurang lebih melibatkan delapan juta orang lebih sebagai kontribusi masyarakat dunia dan keseriusan dalam mengatasi berbagai masalah dalam pembangunan.¹ Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ini pemerintah Indonesia juga memiliki keseriusan dalam pengentasan dan pembangunan dalam berbagai sektor utamanya dalam lingkup Ekonomi, Pendidikan, Sosial, kesehatan, lingkungan dan sebagainya yang kemudian dijabarkan dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh. Pemerintah Indonesia saat ini telah melaksanakan program tujuan pembangunan berkelanjutan sejak 2015 dengan puncak agenda pada 2030 sebagai bentuk agenda nasional yang terstruktur hingga lingkup terkecil yaitu dikemas dalam SDGs Desa.

SDGs Desa atau pembangunan berkelanjutan desa memiliki poin tujuan tambahan di lingkup kelembagaan, sehingga 18 poin dalam SDGs Desa adalah sebagai berikut :

1. Tanpa adanya kemiskinan
2. Tanpa adanya kelaparan
3. Mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan
4. Adanya Pendidikan berkualitas
5. Adanya partisipasi perempuan

¹ Uswatun Hasanah, "The Common Goals of BAZNAS ' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) According to Maqasid Al- Sharia Perspective Abstract : Keywords : Abstrak : Kata Kunci :'" 16, no. 2 (2021): 302–26.

6. Ketersediaan air bersih dan sanitasi
7. Tenaga berbasis energi terbarukan atau bersih
8. Pemerataan pertumbuhan ekonomi
9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
10. Mewujudkan kesetaraan tanpa kesenjangan
11. Terciptanya keamanan dan kenyamanan
12. Desa berbasis konsumsi dan produksi yang memperhatikan lingkungan
13. Ketanggapan perubahan kondisi iklim
14. Kepedulian terhadap lautan
15. Kepedulian terhadap lingkungan darat
16. Berkeadilan yang damai
17. Kerjasama dalam pembangunan
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif.²

Setelah beberapa tahun berjalan dalam pembangunan indonesia sistem SDGs Desa ini mengalami berbagai tantangan salah satunya adalah data mengenai keterbutuhan atau prioritas pembangunan. Adanya prioritas pembangunan ini penting karena dari semua tujuan pasti memiliki dimensi Urgensinya masing-masing oleh karena itu untuk memberikan acuan pembangunan berkelanjutan dengan berbasis prioritas sangat diperlukan terutama mengingat beberapa keterbatasan dalam pengambilan data prioritas tersebut salah satunya adalah keuangan, tenaga, pengetahuan dimensi atau indikator yang mempengaruhi dan beberapa faktor lain. Oleh karena itu salah satu alternatif dalam mengatasi di lingkup keuangan baik penentuan skala prioritas maupun dana pembangunan dapat melalui mekanisme keuangan sosial muslim atau biasa dikenal dengan zakat, infaq, dan sedekah yang mana potensinya sangat besar seiring dengan indonesia sebagai mayoritas muslim.³

Sistem keuangan sosial Islam atau zakat merupakan dana yang wajib dikeluarkan atau dibayarkan oleh seorang muslim yang telah melewati batasan atau nishab tertentu dengan ketentuan besaran dan haul yang mengikutinya. Orang

² Nurlaila Husain et al., “Pendampingan Masyarakat Desa Lakeya Dalam Pencapaian SDGs Desa” 1, no. 2 (2022): 31–37.

³ Rizaldi Yusfiarto, Ananda Setiawan, and Septy Setia Nugraha, “Literacy and Intention to Pay Zakat : A Theory Planned Behavior View Evidence from Indonesian Muzakki,” *International Journal of Zakat* 5, no. 1 (2020): 15–27.

yang telah berkewajiban zakat dapat diartikan pula sebagai orang mampu sehingga secara tidak langsung dapat dimaknai bahwa ada bagian orang yang membutuhkan dalam setiap harta yang dipunya dan dapat diartikan juga bahwa konsep keuangan sosial Islam ini juga sebagai solusi mengatasi kesenjangan di sektor ekonomi yang kemudian dapat mengatasi pula dalam berbagai sektor lainnya. Secara umum pula zakat memiliki dwi fungsi yaitu fungsi vertikal sebagai intisari bentuk ibadah antara hamba kepada Tuhan yaitu Allah SWT dan fungsi horizontal sebagai dana sosial kemasyarakatan yang dapat digunakan dalam berbagai bentuk pembangunan segi sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya.⁴

Yang kemudian tertuang dalam firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam acara “Sosialisasi Zakat” yaitu yang diselenggarakan BAZNAS Jepara, Ir. Sholih mengungkapkan bahwa potensi Zakat yang ada di jepara sebesar 19 Miliar Rupiah namun baru terserap sebesar 3,5 Miliar Rupiah yang keseluruhannya dari ASN, TNI, dan Polri sehingga hal tersebut dapat dimaksimalkan potensinya dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu poin SDGs dan Indeks desa zakat dalam dimensi ekonomi. Besaran potensi tersebut tentu perlu langkah distribusi yang tepat sasaran dan efektif sesuai

⁴ Desmi Novitasari, “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu” (IAIN Bengkulu, 2018).

kebutuhan dengan skala prioritas tertentu dalam pembangunan yang dalam konteks zakat terdapat indeks yang mengukur skala prioritas pembangunan tersebut dalam lingkup desa yang disusun oleh pusat kajian strategis BAZNAS yang lebih dikenal Puskas BAZNAS.⁵

Aturan Indeks yang mengukur skala prioritas pembangunan melalui mekanisme zakat ini kemudian disebut dengan Indeks Desa Zakat (IDZ). Indeks desa zakat merupakan mekanisme instrumen yang digunakan untuk mengukur dan menyimpulkan layak atau tidaknya desa mendapatkan bantuan dari dana zakat sehingga skala prioritas bantuan dapat tersusun dan diketahui.⁶ Selain sebagai pengukuran indeks desa zakat memiliki kegunaan sebagai alat pemantau atau *monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan serta pemberdayaan dari lingkup desa. Dalam indeks desa zakat terdapat beberapa dimensi yang diukur yaitu :

1. Ruang lingkup ekonomi
2. Ruang lingkup kesehatan
3. Dimensi pendidikan
4. Ruang lingkup sosial dan kemanusiaan
5. Dimensi dakwah.⁷

Dalam setiap dimensi atau ruang lingkup memiliki berbagai variabel pengukur dan indikator yang berisikan setiap kemungkinan kondisi yang ada di masyarakat untuk dilakukan pembangunan. Variabel indikator tersebut juga bersinggungan dan selaras dengan berbagai poin yang ada dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sehingga penggunaan indeks desa zakat ini sangat tepat untuk melihat skala prioritas pembangunan berbasis zakat yang terangkum dalam 5 dimensi pembangunan. Dalam indeks desa zakat ini

⁵ Yandip (Prov Jateng), "Mutakhirkan Data Distribusi Zakat," [Jatengprov.go.id](https://jatengprov.go.id), 2022, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/mutakhirkan-data-distribusi-zakat/#:~:text=Disampaikan%2C%20Kabupaten,Rp7%2C2%20miliar%20dalam%20setahun.>

⁶ Tony Mukhammad, Wildhan dan Seno Aji, "Indeks Desa Zakat Pada Desa Penambangan Kabupaten Sidoarjo 2015-2018," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 3 (2020): 169–70.

⁷ Fadhil Fuad Ramadhan, "Pengukuran Indeks Desa Zakat (Studi Di Desa Mandiraja Wetan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah)," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

nantinya akan ada beberapa hasil temuan antara direkomendasikan atau tidaknya untuk dilakukan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Indeks desa zakat ini akan diimplementasikan di desa Pancur kecamatan mayong kabupaten jepara karena desa ini memiliki keunikan dan kemajemukan sosial masyarakatnya sehingga akan sangat menarik untuk ditelusuri lebih lanjut mengenai pembangunannya. Keunikan tersebut akan tergambar seperti berikut :

- a. Keunikan sosial masyarakatnya, di lingkup desa ini rata-rataarganya bermata pencaharian sebagai petani, pengusaha konveksi, dan buruh pabrik garmen dengan tingkat interaksi antararganya yang minim. Selain itu pola interaksi yang masih dapat terjaga hanya ketika dilaksanakannya arisan pengajian sehingga kondisi ini menjadikan minimnya pengetahuan mengenai kondisi antar warga dusun pada khususnya dan warga desa pada umumnya sehingga secara tidak langsung pemerintah desa tidak cukup untuk mengetahui kondisiarganya melalui observasi semata.
Desa pancur secara geografis terletak di ujung dan tergolong terpencil dibanding desa lain dalam struktur kecamatan mayong ini sehingga membuat mobilitas dan akses dapat dibidang terbatas dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini tentunya juga memerlukan perhatian khusus dalam rangka pembangunan berkelanjutan SDGs ini. Dengan banyaknya daerah dan pancur merupakan desa terluas di mayong sehingga memerlukan skala prioritas pembangunan melalui mekanisme indeks desa zakat ini.
- b. Pendidikan, desa ini memiliki lembaga pendidikan sangat banyak baik di lingkup dasar maupun menengah tetapi kondisi ini baru tercipta beberapa tahun terakhir sehingga generasi sebelum saat ini atau generasi X dan Y (tahun 1965-1980 dan tahun 1981-1996) sehingga jarak pendidikan ini yang secara tidak langsung menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan SDGs Desa.⁸

⁸ Ahmet Alkan Çelik, Mert Kılıç, and Erkut Altında, "Does the Reflection of Foci of Commitment in Job Performance Weaken as Generations

- c. Ekonomi, secara garis besar ekonomi warga desa berada di garis kemiskinan terutama di daerah-daerah yang tergolong terpencil. Hal ini berbanding terbalik terhadap daerah yang terlewati jalan alternatif kabupaten dimana rata-rata merupakan pengusaha konveksi sehingga kehidupan mereka serba tercukupi. Ketimpangan secara ekonomi ini yang kemudian menurut Islam adanya distribusi melalui mekanisme zakat. Secara umum gambaran kemiskinan di kabupaten jepara adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Data Kemiskinan Jepara 2019-2021

Kemiskinan	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin		
	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan	386693.00	407056.00	419028.00
Jumlah Penduduk Miskin (000)	83.50	91.14	95.22
Persentase Penduduk Miskin (%)	6.66	7.17	7.44

Sumber : BPS Jepara:2022 (diolah)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa garis kemiskinan setiap tahun di jepara justru meningkat. Hal ini menjadi tanda tanya besar karena di jepara setiap tahunnya justru industri besar dibangun semakin banyak yang tentunya lapangan pekerjaan tersedia semakin banyak tetapi mengapa kemudian garis kemiskinan justru naik. Hal ini nanti juga yang akan menjadi bahasan di salah satu indikator ekonomi dalam indeks desa zakat sehingga pembangunan dalam lingkup ekonomi terutama ekonomi yang bersifat kemandirian akan sangat membantu warga.

Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melihat desa pancur ini sebagai desa yang layak dibantu atau tidaknya menggunakan dana zakat dan dengan skala prioritas seperti apa pembangunan berkelanjutannya akan dilaksanakan dengan judul penelitian **”Implementasi Indeks Desa Zakat untuk Efektivitas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**

di Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat diartikan sebagai pertanyaan atas kondisi yang perlu diungkap atau diketahui berdasarkan identifikasi latar belakang sehingga dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi IDZ dalam dimensi ekonomi dan korelasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di desa Pancur kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana implementasi IDZ dalam dimensi kesehatan dan korelasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di desa Pancur kabupaten Jepara ?
3. Bagaimana implementasi IDZ dalam dimensi pendidikan dan korelasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di desa Pancur kecamatan Mayong kabupaten Jepara ?
4. Bagaimana implementasi IDZ dalam dimensi sosial kemanusiaan dan korelasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di desa Pancur kabupaten Jepara ?
5. Bagaimana implementasi IDZ dalam dimensi dakwah dan korelasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di desa Pancur kecamatan Mayong kabupaten Jepara ?
6. Bagaimana pemetaan pembangunan berbasis IDZ di desa Pancur kabupaten Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan berbagai kriteria permasalahan maka peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam menjawab permasalahan melalui penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi IDZ dalam dimensi ekonomi dan korelasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di desa Pancur kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi IDZ dalam dimensi kesehatan dan korelasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di desa Pancur kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi IDZ dalam dimensi pendidikan dan korelasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di desa Pancur kecamatan Mayong kabupaten Jepara.
4. Untuk mengetahui bagaimana implementasi IDZ dalam

dimensi sosial masyarakat dan korelasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di desa Pancur kabupaten Jepara.

5. Untuk mengetahui bagaimana implementasi IDZ dalam dimensi dakwah dan korelasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di desa Pancur kabupaten Jepara.
6. Untuk mengetahui bagaimana pemetaan pembangunan berbasis IDZ di desa Pancur kecamatan Mayong kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis yaitu sebagai rujukan pengetahuan tentang pembangunan berkelanjutan sehingga pembaca mengetahui keterbutuhan dan skala prioritas pembangunan yang nantinya juga akan ada manfaat secara praktis oleh pemangku kepentingan baik pemerintah desa maupun lembaga zakat yang dapat dipahami sebagai berikut :⁹

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini berusaha memberikan pengetahuan mengenai implementasi indeks desa zakat sekaligus pembuktian mengenai teori ini dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - b. Memberikan pengetahuan mengenai dimensi dan indikator apa saja yang memerlukan prioritas lebih dalam pembangunan berkelanjutan.
 - c. Dapat menjadi acuan, gambaran, serta rujukan bagi rancangan serupa berikutnya.
2. Manfaat praktis

Berdasarkan hasil penelitian indeks ini dapat dijadikan acuan oleh Lembaga Amil, Unit Pengelola Zakat, BAZNAS dalam melakukan pembangunan berbasis zakat dimana dalam hasil penelitian nantinya terdapat rekomendasi layak atau tidaknya untuk dibantu dengan

⁹ M Mahmudi, A Anwar, and U Faruq, "Implementasi Indeks Desa Zakat (IDZ) Pada Desa Jrangoan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang," *KABILAH: Journal of ...* 5, no. 14 (2020): 0–3, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5566%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/download/5566/3549>.

menggunakan dana zakat ini.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian berbasis indeks ini menggunakan sistematika yang dibagi dalam setiap bab untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan dan memahami isi dari penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan : memiliki isi tentang latar belakang dilakukannya penelitian yang mencakup urgensitas dan kesenjangan masalah yang kemudian dirangkum dalam rumusan masalah dan dijawab dengan tujuan masalah serta memiliki manfaat dalam penelitian baik secara lingkup teoritis maupun praktis sebagai lanjutan penelitian.
2. Bab II Landasan Teori : Berisikan tentang deskripsi teori yang relevan dan menjadi acuan dan landasan dalam melakukan penelitian yang disertai penelitian terdahulu, dilanjut kerangka berfikir dalam melakukan penelitian dan atau dugaan sementara dalam penelitian
3. Bab III Metode Penelitian : dalam bab ini memiliki bahasan mengenai jenis penelitian dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian, lokasi dan populasi penelitian, serta dijabarkan tentang definisi operasional variabel yang kemudian pada inti bagaimana cara pengumpulan data yang diperlukan dan diakhiri dengan teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Berisikan tentang gambaran objek penelitian, analisis data menggunakan indeks desa zakat yang menjadi fokus penelitian dan kaitannya dengan skala prioritas dalam pembangunan berkelanjutan dan ditutup dengan pembahasan secara mendetail setiap data yang ada.
5. Bab V Penutup : berisikan simpulan yang memuat juga keterbatasan penelitian dan manfaat penelitian setelah melakukan penelitian kemudian diakhiri dengan saran agar dapat tercipta penelitian lebih baik berikutnya.